



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ACEH

KATA PENGANTAR



Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh tahun 2025 triwulan II telah selesai disusun. Laporan ini untuk menyajikan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Aceh tahun 2025 dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta berdasarkan perkembangan indikator yang ada.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Aceh di masa mendatang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan kinerja SKIPM Aceh pada masa yang akan datang.

Aceh Besar, 17 Juli 2025

Kepala SKIPM Aceh



Diky Agung Setiawan
Diky Agung Setiawan S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
i Daftar Isi	ii
ii Daftar Tabel.....	iii
iii Daftar Gambar.....	iv
iv Ringkasan Eksekutif.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Arah Kebijakan Isu Strategis.....	5
1.3 Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi Misi	7
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	11
3.2 Anggaran	77
3.3 Sumber Daya	78
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	80
4.2 Rekomendasi	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II / Semester I	9
Tabel 2 Rekapitulasi Sertifikasi CPIB Kapal SKIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan II	18
Tabel 3 Target dan Realisasi IKS 01.01 Tahun 2025 Triwulan II	19
Tabel 4 Target dan Realisasi IKS 01.02 Tahun 2025 Triwulan II	23
Tabel 5 Data Permohonan Sertifikasi Kelayakan Produk SKIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan II.....	24
Tabel 6 Data Permohonan Sertifikasi Kelayakan Produk SKIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan II.....	25
Tabel 7 Target dan Realisasi IKS 01.03 Tahun 2025 Triwulan II	30
Tabel 8 Data Jumlah Sertifikasi Ekspor Tahun 2025 Semester I	33
Tabel 9 Target dan Realisasi IKS 01.04 Tahun 2025 Semester I	33
Tabel 10 Target dan Realisasi IKS 02.01 Tahun 2025 Triwulan II	40
Tabel 11 Target dan Realisasi IKS 02.02 Tahun 2025 Triwulan I	40
Tabel 12 Target dan Realisasi Realisasi Nilai IKPA Tahun 2025 Triwulan II / Semester I	49
Tabel 13 Target dan Realisasi IKS 03.02 Tahun 2025 Triwulan II	51
Tabel 14 Target dan Realisasi IKS 03.03 Tahun 2025 Triwulan II	51
Tabel 15 Target dan Realisasi IKS 03.04 Tahun 2025 Triwulan II	55
Tabel 16 Target dan Realisasi IKS 03.05 Tahun 2025 Triwulan II	61
Tabel 17 Target dan Realisasi IKS 03.06 Tahun 2025 Triwulan II	61
Tabel 18 Target dan Realisasi IKS 03.07 Tahun 2025 Triwulan II	65
Tabel 19 Target dan Realisasi IKS 03.08 Tahun 2025 Triwulan II	69
Tabel 20 Detail Nilai Unsur Pelayanan Tahun 2025 Triwulan II	74
Tabel 21 Target dan Realisasi IKS 03.01 Tahun 2025 Triwulan II	74
Tabel 22 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan.....	78
Tabel 23 Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Tahun 2025.....	4
Gambar 2 Sasaran Strategis Tahun 2025.....	8
Gambar 3 Sasaran Kinerja Tahun 2025 Dalam Aplikasi Kinerja Sasaran Kinerja Tahun 2025	12
Gambar 4 Tampilan Aplikasi Kinerja Tahun 2025 Triwulan II.....	12
Gambar 5 <i>Capture</i> Capaian Kinerja Dalam Aplikasi Kinerja Tahun 2025 Triwulan II.....	13
Gambar 6 Dokumentasi Kegiatan Sektor Produksi Primer Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025228	
Gambar 7 Kegiatan Sektor Produksi Pasca Panen Tahun 2025 Triwulan II	30
Gambar 8 Kegiatan Pengambilan Sampel Ikan dan Monitoring Penjaminan Mutu Perikanan Domestik di Kota Banda Aceh Tahun 2025 Semester I.....	30
Gambar 9 Diskusi Bersama Dengan Bea Cukai Mengenai Penerbitan SMKHP	44
Gambar 10 Amandemen Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboraturium Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025	37
Gambar 11 Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Semester II.....	45
Gambar 12 Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Central Government Advisory Tahun 2025	46
Gambar 13 Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Semester I 2025	55
Gambar 14 Pelatihan SAKIP E Milea KKP	59
Gambar 15 <i>Capture</i> Aplikasi Sidak KKP SKIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan II.....	60
Gambar 16 Data dan Dokumentasi Kegiatan Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan II	64
Gambar 17 Kegiatan Rutin Apel Pagi dan Briefing Pembangunan Zona Integritas	69
Gambar 18 Jenis Layanan BPPMHKP Aceh	72
Gambar 19 Infografis Data Nilai Capaian Perolehan Survei Kepuasan Masyarakat SKIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan II	73
Gambar 20 <i>Capture</i> Portal Penilaian Hasil SKM SKIPM Aceh Pada Aplikasi Susan KKP Tahun 2025	73
Gambar 21 Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025	75
Gambar 22 Data E Monev Bappenas Tahun 2025 Sampai Triwulan II	77

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum, SKIPM Aceh telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2025 triwulan II. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja (IK) yang telah ditetapkan.

Dari seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerja SKIPM Aceh tahun 2025 triwulan II seluruhnya memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai pencapaian Nilai Kerja Organisasi (NKO) SKIPM Aceh tahun 2025 triwulan II adalah sebesar 112,26 %. Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi kinerjajaku dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran dan terdiri dari 15 indikator kinerja masuk dalam kategori istimewa (berwarna biru). Dari seluruh indikator kinerja yang dimiliki telah tercapai sesuai dengan target dan atau melebihi target yang ditetapkan, dengan perhitungan nilai posisi akhir. Nilai NKO tersebut ditunjukkan dari pencapaian sasaran strategis (SS) dan target Indikator Kinerja SKIPM Aceh sampai akhir triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target sebesar 70 % sampai dengan akhir triwulan II dapat tercapai sebesar 100 %.
 - b. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target sebesar 70 % sampai dengan akhir triwulan II telah tercapai sebesar 100 %.
 - c. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target sebanyak 1 lokasi, sampai dengan akhir triwulan II atau semester I telah tercapai sebanyak 1 lokasi pada tahap semester I.
 - d. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target sebesar 99 % sampai dengan akhir triwulan II telah tercapai sebesar 100 %.

2. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target tahunan sebesar 75 , belum dilakukan perhitungan pada triwulan II.
 - b. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target tahunan sebesar 75 , belum dilakukan perhitungan pada triwulan II.
3. Pencapaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target semester 85 dan tahunan sebesar 92, sampai dengan akhir triwulan II atau semester I telah tercapai sebesar 98,65 %.
 - b. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target tahunan senilai 71,50 belum dilakukan perhitungan pada triwulan II.
 - c. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target tahunan sebesar 110 %, belum dilakukan perhitungan pada triwulan II.
 - d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target indeks semester sebesar 75 dan target tahunan sebesar 87, pada triwulan II atau semester I tercapai sebesar 86, 67.
 - e. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target tahunan sebesar 86, belum dilakukan perhitungan pada triwulan II.
 - f. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target tahunan dan triwulanan sebesar 85 %, pada triwulan II dapat tercapai sebesar 100 %.
 - g. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target tahunan dan triwulanan sebesar 76 %, pada triwulan II dapat tercapai sebesar 100 %.
 - h. Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target tahunan sebesar 70 %, belum dilakukan perhitungan pada triwulan II.

- i. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, dengan target tahunan dan triwulanan senilai 88, dapat tercapai sebesar 88,75.

Realisasi anggaran Stasiun KIPM Aceh sampai dengan akhir triwulan II sebesar Rp 1.995.554.435,- atau setara dengan 51,31 % dari alokasi anggaran pagu revisi sebesar Rp. 3.889.928.000,. Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Aceh telah melakukan beberapa upaya dan perbaikan kinerja, sehingga memperoleh beberapa prestasi yaitu :

1. Nilai Kinerja Organisasi Kategori Istimewa (NKO = 117,43) Tahun 2025 Triwulan I Lingkup KKP;
2. Unit Kerja Kategori Informatif Tahun 2024 Lingkup KKP;
3. Unit Kerja Dengan Nilai SAKIP Tahun 2024 Kategori A (Memuaskan);
4. Pada tanggal 26 Juni 2025, Badan Mutu KKP Aceh melaksanakan Forum Konsultasi Publik terkait dengan Standar Pelayanan Publik Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh instansi terkait, akademisi, masyarakat pengguna layanan, organisasi masyarakat dan media massa.

Berdasarkan kondisi existing pelaksanaan kinerja organisasi serta pelaksanaan program dan kegiatan Stasiun KIPM Aceh sampai dengan triwulan II Tahun 2025 terdapat beberapa tantangan yang menjadi perhatian karena berpengaruh pada pelaksanaan indikator kinerja antara lain : adanya blokir anggaran atas pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan perubahan struktur kelembagaan unit kerja pelaksana teknis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas. Asas ini menegaskan bahwa setiap aktivitas, kebijakan, serta hasil akhir dari pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara negara wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban setiap instansi pemerintah untuk memberikan laporan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan kinerja serta penggunaan sumber daya publik secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan asas akuntabilitas tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol dan evaluasi terhadap efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini memuat capaian kinerja utama, realisasi target, serta analisis terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan adanya laporan kinerja yang akuntabel, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah telah menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Selain itu, laporan tersebut juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang serta sebagai alat untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*result-based management*). Oleh karena itu, penguatan asas akuntabilitas melalui pelaporan kinerja yang transparan dan akurat merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja SKIPM Aceh. Selain itu untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Pasa saat ini transformasi BPPMHKP masih dalam proses hingga ke seluruh UPT di Indonesia. Diharapkan seluruh proses perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ini dapat segera selesai sehingga berdampak pada kegiatan yang transformatif dan inovatif untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat yang akan terus berkembang.

Dalam rangka mendukung visi BPPMHKP yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Stasiun KIPM mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu :

- Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
- Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Stasiun KIPM Aceh sebagai Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP mengemban tugas menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, SKIPM Aceh dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi hingga pada tahun 2024 dalam melaksanakan misi yang telah ditentukan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja SKIPM Aceh.

Dalam menjalankan tugasnya, sampai dengan tahun 2024 SKIPM Aceh mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang pegawai baik ASN maupun Non ASN. Adapun struktur organisasi SKIPM Aceh dapat dilihat dalam Gambar 1. sebagai berikut.

Gambar 1 Struktur Organisasi Tahun 2025



Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Aceh dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.2. Arah Kebijakan Isu Strategis

Renstra KKP (Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan) untuk periode 2025-2030 belum dirilis secara resmi oleh KKP. Namun, secara umum, Renstra KKP akan fokus pada beberapa area utama, seperti:

1. Peningkatan Kualitas SDM:

- Meningkatkan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan inovasi.
- Mengembangkan SDM yang kompeten dan profesional di berbagai bidang kelautan dan perikanan.

2. Pengembangan Inovasi dan Riset:

- Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.
- Mendorong kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pengembangan inovasi dan riset.

3. Peningkatan Keberlanjutan:

- Meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Mencegah dan mengurangi pencemaran laut, serta melindungi ekosistem laut.

4. Pengembangan Ekonomi Kelautan dan Perikanan:

- Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.
- Menciptakan lapangan kerja baru di sektor kelautan dan perikanan.
- Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir dan perikanan.

5. Penanganan Sampah Plastik:

- Mengelola sampah plastik secara berkelanjutan melalui pendekatan pentahelix dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Renstra KKP akan menjadi pedoman bagi KKP dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam periode 2025-2030 untuk mencapai visi dan misi pemerintah.

1.3 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja BPPMHKP Aceh sampai akhir triwulan II Tahun 2025. Membandingkan antara capaian kinerja (performance results) dengan rencana kinerja (performance plan) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPMHKP Aceh sampai akhir triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia sejalan dengan Asta Cita Presiden Indonesia pada poin dua dan lima. Poin dua adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Poin lima adalah melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Oleh karena itu visi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diselaraskan dengan *Asta Cita*:

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

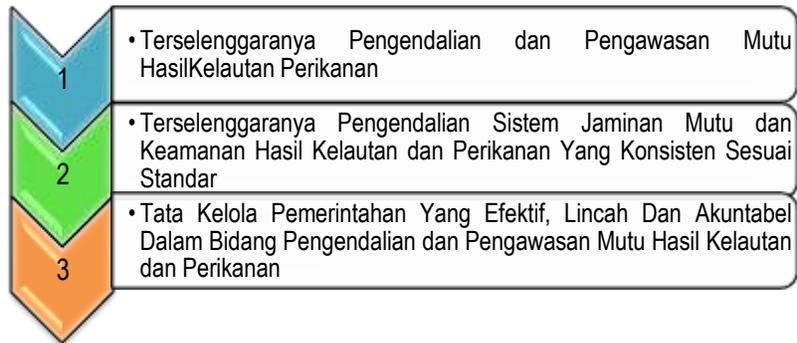
"Menjadi kementerian yang unggul dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberagaman hayati laut, serta memajukan ekonomi biru Indonesia."

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan
 - Mendorong pengelolaan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan untuk memastikan ekosistem laut tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk kepentingan masyarakat.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Nelayan
 - Memberikan dukungan kepada masyarakat pesisir, nelayan, dan pelaku usaha perikanan melalui peningkatan kapasitas dan akses pasar, serta kebijakan yang berpihak pada mereka.
3. Memajukan Industri Perikanan dan Kelautan yang Inovatif
 - Mendorong riset dan pengembangan dalam sektor kelautan dan perikanan agar dapat menciptakan produk dan teknologi baru yang meningkatkan daya saing dan nilai tambah.
4. Mengembangkan Ekonomi Biru
 - Mendorong pemanfaatan potensi ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan, baik untuk sektor perikanan, pariwisata bahari, maupun energi laut.
5. Melindungi Keanekaragaman Hayati Laut
 - Mengambil langkah-langkah nyata untuk melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati laut Indonesia sebagai kekayaan alam yang sangat penting bagi ekosistem global.
6. Menjaga Ketahanan Pangan Berbasis Sumber Daya Laut

- Meningkatkan produksi perikanan dan produk kelautan yang aman, sehat, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan mendukung ketahanan pangan.

Gambar 2 Sasaran Strategis Tahun 2025



Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 terdapat 16 Indikator Kinerja yang merupakan implementasi dari tugas dan fungsi SKIPM Aceh dalam mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup SKIPM Aceh guna mendukung manajemen internal BPPMHKP.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2025 disusun secara bertahap dan berkesinambungan. Rencana Kinerja SKIPM Aceh Tahun Anggaran 2025 diimplementasikan dalam Penetapan Target Kinerja Tahun 2025. Target kinerja SKIPM Aceh yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya dan dirinci ke dalam masing-masing indikator kinerja dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II / Semester I

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET / TAHUN	TARGET TW II / SEMESTER I TAHUN 2025	CAPAIAN SD TW II / TAHUN 2025
SK 1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70	70	100
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70	70	100
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Lokasi)	1	1	1
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	99	99	100
SK 2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	75	-	-
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	75	-	-
SK 3	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	92	85	98,65
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	71,5	-	-
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	100	-	-
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Indeks)	87	75	86,67
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	86	-	-
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	85	85	100
		13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan	76	76	100

	Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)			
14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70	-	-
15.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	88	88	88,75

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja, BKIPM telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan periode pelaporan, sedangkan kriteria yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada laporan kinerja ini mengikuti pedoman pengelolaan kinerja pada aplikasi “kinerjaku” tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Angka maksimum tingkat capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU, sebagaimana berikut ini:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

4. IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan;
5. IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan;
6. IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IK melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IK stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

Akuntabilitas kinerja organisasi BPPMHKP merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkup eselon I. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup BPPMHKP, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Gambar 3 Sasaran Kinerja Tahun 2025 Dalam Aplikasi Kinerja Sasaran Kinerja Tahun 2025

No	Kode	Sasaran	Status	Aksi
1	S.01	Tersempurnanya Pengendalian dan Penguasaan Mutu Hasil Keluaran Perikanan	Dipastikan	Dit
2	S.02	Tersempurnanya Pengendalian Sistem Jambak Mutu dan Keamanan Hasil Keluaran dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	Dipastikan	Dit
3	S.03	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincuh Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Penguasaan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	Dipastikan	Dit

(Sumber : Aplikasi Kinerjaku KKP, 2025)

Gambar 4 Tampilan Aplikasi Kinerja Tahun 2025 Triwulan II



(Sumber : Aplikasi Kinerjaku KKP, 2025)

Sampai periode akhir tahun 2025 triwulan II, unit kerja SKIPM Aceh memperoleh nilai pengukuran skor kinerja (NKO) September sebesar 112,26 (Istimewa). Nilai ini berdasarkan perhitungan secara otomatis yang terpotret melalui aplikasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat portal <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Pada aplikasi ini secara sistematis menjelaskan uraian indikator sasaran, sasaran indikator kinerja beserta pengukuran dan penilaiannya. Capaian atas 15 indikator kinerja SKIPM Aceh yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 5 Capture Capaian Kinerja Dalam Aplikasi Kinerja Tahun 2025 Triwulan II

NKO Juni - 2025

Unit Kerja : STASIS KPM ACEH

Skor Kinerja : 112.26

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗ silahkan bila nya di update kembali, dengan cara klik tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara klik tombol Tambah Data Dukung➡

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Juni	Capaian Juni	%	Target s/d Juni	Capaian s/d Juni	%	Tgl Input
S.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Penguasaan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						112.25			112.25		
KS.01.01	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produk Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasus KPM Aceh Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓	%	Maksimal	Nilai Positif Akhir	70.00	70.00	100.00	100.00	70.00	100.00	100.00	03-Jul-2025 15:57
	Tambah Data Dukung➡											
KS.01.02	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produk Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasus KPM Aceh Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓	%	Maksimal	Nilai Positif Akhir	70.00	70.00	100.00	100.00	70.00	100.00	100.00	03-Jul-2025 15:57
	Tambah Data Dukung➡											
KS.01.03	Lokasi Penguasaan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produk Pasca Panen Lingkup UPT Stasus KPM Aceh Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓	Lokasi	Maksimal	Nilai Positif Akhir	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	03-Jul-2025 15:57
	Tambah Data Dukung➡											
KS.01.04	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Dibantu Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasus KPM Aceh Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓	%	Maksimal	Nilai Positif Akhir	99.00	99.00	100.00	101.01	99.00	100.00	101.01	03-Jul-2025 15:57
	Tambah Data Dukung➡											
S.02	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar											
KS.02.01	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasus KPM Aceh Tambah Data Dukung➡	Nilai	Maksimal	Nilai Positif Akhir	75.00	0.00			0.00	0.00		03-Jul-2025 15:57
KS.02.02	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasus KPM Aceh Tambah Data Dukung➡	Nilai	Maksimal	Nilai Positif Akhir	75.00	0.00			0.00	0.00		03-Jul-2025 15:57
S.03	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincih Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Penguasaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						114.27			114.27		
KS.03.01	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KIPA) Lingkup UPT Stasus KPM Aceh Data Dukung1 ✓	Nilai	Maksimal	Nilai Positif Akhir	82.00	85.00	96.65	116.06	85.00	96.65	116.06	03-Jul-2025 15:57
	Tambah Data Dukung➡											

IKS E3 E2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akte	71,50	0,00			0,00	0,00	03-Jul-2025 15:57	
	Tambah Data Dukung											
IKS E3 E3	Persentase Penyediaan Terman BPRK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh	%	Maximize	Nilai Positif Akte	100,00	0,00			0,00	0,00	03-Jul-2025 15:57	
	Tambah Data Dukung											
IKS E3 E4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akte	87,00	75,00	88,67	119,56	75,00	88,67	119,56	03-Jul-2025 15:57
	Tambah Data Dukung											
IKS E3 E5	Pertanian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akte	86,00	0,00			0,00	0,00	03-Jul-2025 15:57	
	Tambah Data Dukung											
IKS E3 E6	Persentase Realisasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh	%	Maximize	Nilai Positif Akte	85,00	85,00	100,00	117,66	85,00	100,00	117,66	03-Jul-2025 15:57
	Tambah Data Dukung											
IKS E3 E7	Persentase Rencana Usah Pengaliran PDJ Yang Diumumkan Pada BRRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh	%	Maximize	Nilai Positif Akte	76,00	76,00	100,00	120,80	76,00	100,00	120,80	03-Jul-2025 15:57
	Tambah Data Dukung											
IKS E3 E8	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh	%	Maximize	Nilai Positif Akte	70,00	0,00			0,00	0,00	03-Jul-2025 15:57	
	Tambah Data Dukung											
IKS E3 E9	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akte	88,00	88,00	88,75	160,86	88,00	88,75	160,86	03-Jul-2025 15:57
	Tambah Data Dukung											

(Sumber : Aplikasi Kinerja KKP, 2025)

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

IKS 1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CBIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada :

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Pada tahun 2025 sampai dengan periode triwulan II telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, diantaranya yaitu :

- SKIPM Aceh dalam pelaksanaan sertifikasi primer merujuk pada pedoman pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Mutu Nomor B. 233/BPPMHKP/OT.310/2015 tanggal 24 Februari 2025.
- Pelaksanaan koordinasi bersama dengan Pusat Produksi Primer yang diikuti oleh seluruh UPT setiap hari Selasa setiap minggunya (*help desk*) untuk mengetahui progress pelaksanaan sertifikasi CPIB di atas kapal dan kendala-kendala di lapangan di setiap UPT.
- Telah dilaksanakan sertifikasi CPIB di atas kapal oleh tim inspektur pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2025 sebanyak 5 kapal ikan di PPS Kutaraja, Banda Aceh.
- Pada tanggal 19 Juni 2025 bertempat di ruang rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh telah dilakukan koordinasi dan sosialisasi sertifikasi bidang produksi primer khususnya kegiatan sertifikasi CBIB dengan Direktorat Perikanan Budidaya, penyuluh kelautan dan perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan kota/kabupaten.
- Koordinasi pelaksanaan sertifikasi CBIB dengan Kepala Pusat Produksi Primer dan seluruh UPT guna menetapkan strategi untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi CBIB yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025 secara daring. Berdasarkan arahan Kapus Produksi Primer maka seluruh UPT untuk melakukan *listing* pembudidaya di wilayah masing-masing sebanyak-banyaknya (setiap UPT 3000 pembudidaya ikan) untuk kemudian disorting menjadi 300 pembudidaya *by name by address*, selanjutnya nanti akan dipersempit lagi menjadi 30 pembudidaya ikan yang akan ditetapkan menjadi target sertifikasi CBIB tahun 2025 dan akan

dilaksanakan setiap hari Rabu setiap minggunya (*help desk*) untuk koordinasi via daring guna mempercepat kegiatan sertifikasi CBIB.

- Pelaksanaan pendampingan terhadap pelaku usaha penangkapan ikan oleh SKIPM Aceh pada tanggal 20 Juni 2025 bertempat di TPI Ulee Lheu dalam rangka persiapan kelengkapan persyaratan sertifikasi CPIB di atas kapal yaitu penerbitan NIB melalui OSS.
- Telah dilakukan surveilan penerapan CPIB di PT. Swadaya Mitra Perkasa pada tanggal 27 Juni 2025 oleh tim inspektur mutu dalam rangka persiapan perpanjangan sertifikat CPIB yang akan kadaluarsa pada bulan September 2025.
- Pada kegiatan terkait sektor produksi primer, terdapat beberapa isu, diantaranya yaitu :
 1. Kegiatan CBIB, CPIB, CPPIB, CDOIB dan CPOIB tidak terdapat permohonan dari pengguna layanan
 2. Kearifan lokal Aceh untuk tidak melakukan aktivitas pembongkaran ikan selama seminggu sebelum dan seminggu sesudah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha serta fenomena alam di perairan Aceh yang menyebabkan badai di tengah laut berakibat banyak kapal nelayan yang tidak berlayar
 3. Pelaku usaha perikanan baik budidaya ikan maupun penangkapan ikan yang belum dapat memenuhi keseluruhan persyaratan terutama mengenai pemenuhan persyaratan NIB dan PKKPRL yang diterbitkan oleh Ditjen PRL (untuk budidaya ikan)
 4. Masih banyak pengguna jasa (budidaya ikan dan penangkapan ikan) yang belum mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi saat melakukan permohonan sertifikasi
 5. Pemilihan kode KBLI yang belum sesuai sehingga pengguna jasa (budidaya ikan) yang telah terbit NIB-nya terpaksa melakukan revisi terlebih dahulu yang berakibat tertundanya permohonan sertifikasi CBIB

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X 100\%$$

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal; xn = Jumlah dari unsur pembentuk.

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT

Perhitungan setiap unsur terlebih dahulu dilakukan masing-masing dengan membandingkan jumlah permohonan masuk dari setiap jenis layanan sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer dibagi dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan dari layanan tersebut.

Pada periode triwulan II, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 telah dilakukan periode pengukuran. Berdasarkan karakteristik di wilayah kerja UPT SKIPM Aceh kegiatan primer yang akan dilaksanakan tahun 2025 adalah Cara Penangkapan Ikan Yang Baik (CPIB Kapal). Pada kegiatan CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, dan CDOIB sampai dengan akhir triwulan II masing-masing permohonan sertifikat dan sertifikat yang diterbitkan masih nihil dan dalam tahap persiapan dan pengumpulan data.

Berdasarkan Data Kegiatan Primer Tahun 2025 Triwulan II yang dilaksanakan di Stasiun KIPM Aceh yang diperhitungkan sebagai capaian :

F = CPIB Kapal

- Permohonan Sertifikat = 5
- Sertifikat Yang Diterbitkan = 5

**Tabel. 2 Rekapitulasi Sertifikasi CPIB Kapal SKIPM Aceh Tahun 2025
Triwulan II**

NO	TANGGAL INSPEKSI	NAMA KAPAL	UKURAN KAPAL	KOMODITAS	NOMOR SERTIFIKAT
1	4 – 5 JUNI 2025	KM. DEK UZIA	16 GT	TUNA SEGAR, IKAN SEGAR	ID – CPIB – K – 11 - 250210
2	4 – 5 JUNI 2025	KM. G. YOUKUO	15 GT	TUNA SEGAR, IKAN SEGAR	ID – CPIB – K – 11 - 250211
3	4 – 5 JUNI 2025	KM. LAMPINEUNG UTAMA	13 GT	TUNA SEGAR, IKAN SEGAR	ID – CPIB – K – 11 - 250212
4	4 – 5 JUNI 2025	KM. OKAZAKI	14 GT	TUNA SEGAR, IKAN SEGAR	ID – CPIB – K – 11 - 250213
5	4 – 5 JUNI 2025	KM. SINAR INDAH 10	13 GT	TUNA SEGAR, IKAN SEGAR	ID – CPIB – K – 11 - 250214

- Persentase Capaian =

$$\% F = \frac{5}{5} \times 100 \% = 100 \%$$

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan II :

$$\% X = \frac{100}{1} \%$$

$$\% X = 100 \%$$

Tabel 3 Target dan Realisasi IKS 01.01 Tahun 2025 Triwulan II

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	-	-	-	-	100	-	70	70	120	70	120	-	-

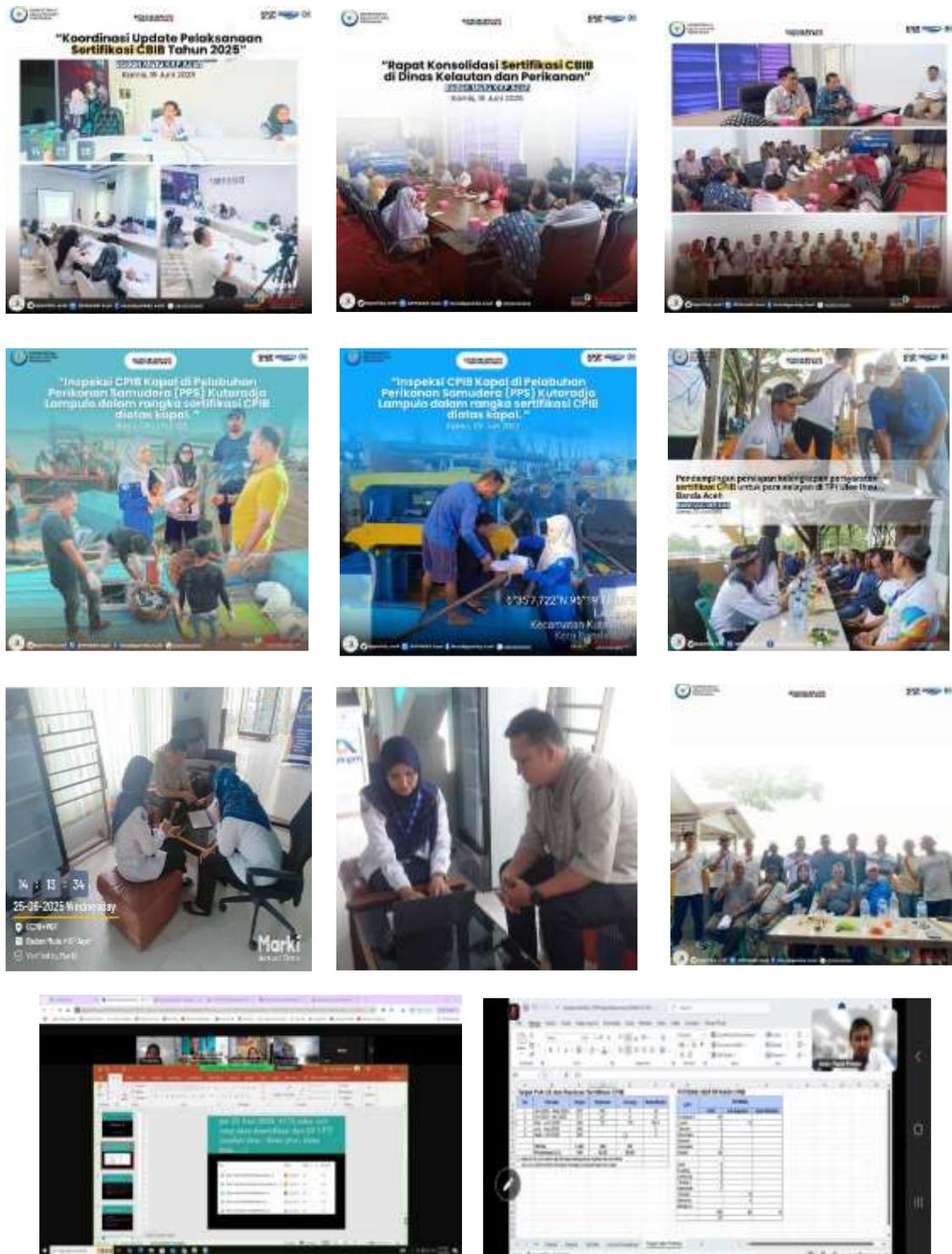
1. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru setelah BPPMHKP dibentuk. Berdasarkan data pada aplikasi kinerjajaku, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 adalah sebesar 100 %. Pada tahun 2025 triwulan II juga tercapai 100 %. Pada periode tahun 2020 sampai dengan 2023 tidak terdapat indikator kinerja ini.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra 2025 – 2029 belum dapat dilakukan sampai dengan penyusunan laporan ini.

Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Sektor Produksi Primer Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025



3. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Upaya yang dilakukan oleh SKIPM Aceh dalam upaya mencapai keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan koordinasi, update data dan informasi, serta referensi pelaksanaan kegiatan secara berkala. Pada masa transisi SOTK sampai dengan saat ini, diharapkan dengan kerja sama seluruh sumber daya yang ada dan koordinasi dengan stakeholder terkait dapat meminimalisir kegagalan pencapaian indikator kinerja.

Pada kegiatan terkait sektor produksi primer, terdapat beberapa isu, diantaranya yaitu :

1. Kegiatan CBIB, CPIB, CPPIB, CDOIB dan CPOIB tidak terdapat permohonan dari pengguna layanan;
2. Kearifan lokal Aceh untuk tidak melakukan aktivitas pembongkaran ikan selama seminggu sebelum dan seminggu sesudah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha serta fenomena alam di perairan Aceh yang menyebabkan badai di tengah laut berakibat banyak kapal nelayan yang tidak berlayar;
3. Pelaku usaha perikanan baik budidaya ikan maupun penangkapan ikan yang belum dapat memenuhi keseluruhan persyaratan terutama mengenai pemenuhan persyaratan NIB dan PKKPRL yang diterbitkan oleh Ditjen PRL (untuk budidaya ikan);
4. Masih banyak pengguna jasa (budidaya ikan dan penangkapan ikan) yang belum mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi saat melakukan permohonan sertifikasi;
5. Pemilihan kode KBLI yang belum sesuai sehingga pengguna jasa (budidaya ikan) yang telah terbit NIB-nya terpaksa melakukan revisi terlebih dahulu yang berakibat tertundanya permohonan sertifikasi CBIB

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan ini yaitu dengan melakukan efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya serta dukungan personil non PNS serta partisipasi penyuluh perikanan. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan Sektor Produksi Primer salah satunya koordinasi dan *remote Inspection* melalui media digital *whatsapp* dan *zoom* .

5. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 merupakan salah satu kegiatan yang terkena efisiensi dan blokir anggaran.

6. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja ini dengan melaksanakan inspeksi, melakukan pengambilan dan pengujian contoh, dan melaksanakan survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan atau peraturan terkait kepada pengguna jasa, melaksanakan program yang telah direncanakan, koordinasi dan kerjasama antara petugas atau inspektur mutu dan/atau tim pusat, penyuluh perikanan serta unit pelaksana teknis eselon I terkait.

IKS 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah maupun secara manual. Berikut formula perhitungan indikator kinerja ini :

$$\% X = \frac{A+B}{xn} X 100\%$$

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP/SSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

1. Capaian Indikator Utama

Tabel 4 Target dan Realisasi IKS 01.02 Tahun 2025 Triwulan II

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW II	Realisas TW II	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	-	-	-	-	106,66	100	70	100	120	70	120	-	-

Layanan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Produk (SKP), yang menjadi tugas baru yang dilaksanakan oleh SKIPM Aceh Tahun 2025 triwulan II tercatat terdapat 21 permohonan dan jumlah sertifikat SKP yang diterbitkan sebanyak 9 sertifikat, seperti data dibawah ini.

Tabel 5 Data Permohonan Sertifikasi Kelayakan Produk SKIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan II

No	Nama UPI	Alamat	Ruang Lingkup
1	CV King Of Milk	Desa Raja, Kel Raja, Kec. Bemdahara, Kabupaten Aceh Tamiang	1. Udang Segar
			2. Lobster Beku
			3. Bandeng Beku
			4. Udang Beku
			5. Ikan Demersal Segar (Bawal Hitam, Malong, Sembilang, Manyung, Layur, Sukang, Bawal, Kakap)
			6. Ikan Pelagis Segar (Tongkol, Layang, Cakalang, Tenggiri)
			7. Kepiting Lunak Beku
			8. Ikan Pelagis Beku (Tongkol, Layang, Cakalang, Tenggiri)
			9. Ikan Demersal Beku (Bawal Hitam, Malong, Sembilang, Manyung, Layur, Sukang, Bawal, Kakap)
			10. Cephalopoda Beku (Sotong, Gurita, Cumi-cumi)
			11. Cephalopoda Segar (Sotong, Gurita, Cumi-cumi)
			12. Rajungan Segar
2	CV. Permata Laut Nusantara	Pahlawan Kab. Aceh Barat, Kel. Suak Sigadeng, Kec. Johan Pahlawan	13. Ikan Kayu
3	PT. Yakin Pasifik Tuna	Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo	14. Tuna Beku
			15. Ikan Demersal Beku (Kambing-kambing, Kerapu, Layur, Kakatua, Bawal)
			16. Fillet Ikan Demersal Beku (Kambing-kambing, Kerapu, Layur, Kakatua, Bawal)
			17. Ikan Demersal Utuh Beku
			18. Steak Tuna Beku

			19. Tuna Cubes Beku
			20. Tuna Loin Beku
			21. Tuna Saku Beku

Tabel 6 Data Sertifikat Kelayakan Produk (SKP)

	Nama UPI	Produk ID	Produk EN	No. Seri	No. SKP	Tgl Terbit	Rank	Alamat	Provinsi	Status/ID/NO Izin OSS
1	CV. KING OF MILK FISH	Udang Segar	Fresh Shrimp	38795	36727/11/SKP/SG/IV/2025	30/04/2025	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202411271647317107889/ NO: 912040174235600010009
2	CV. KING OF MILK FISH	Lobster Beku	Frozen Lobster	38794	36728/11/SKP/BK/IV/2025	30/04/2025	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202411271647317107889/ NO: 912040174235600010008
3	CV. KING OF MILK FISH	Bandeng Beku	Frozen Milkfish	38793	36725/11/SKP/BK/IV/2025	30/04/2025	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202411261822200138361/ NO: 912040174235600010007
4	CV. KING OF MILK FISH	Udang Beku	Frozen Shrimp	38792	36724/11/SKP/BK/IV/2025	30/04/2025	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202411261447226368418/ NO: 912040174235600010005
5	CV. KING OF MILK FISH	Ikan Demersal Segar (Bawal Hitam, Malong, Sembilang, Manyung, Layur, Sukang, Bawal, Kakap)	Fresh Demersal Fish (Black Pomfret, Conger Eel, Eel Tailed Catfish, Giant Catfish, Hairtail, Leatherjacket, Pomfret, Snapper)	38791	36723/11/SKP/SG/IV/2025	30/04/2025	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202411261449153882168/ NO: 912040174235600010006
6	CV. KING OF MILK FISH	Ikan Pelagis Segar (Tongkol, Layang, Cakalang, Tenggrin)	Fresh Pelagic Fish (Bullet Tuna, Shortfin Scad, Skipjack, Spanish Mackerel)	38790	36722/11/SKP/SG/IV/2025	30/04/2025	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202411251641090004665/ NO: 912040174235600010002
7	CV. KING OF MILK FISH	Kepiting Lunak Beku	Frozen Soft Shell Crab	38789	36721/11/SKP/BK/IV/2025	30/04/2025	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202411271656109862391/ NO: 912040174235600010010
8	CV. KING OF MILK FISH	Ikan Pelagis Beku (Tongkol, Layang, Cakalang, Tenggrin)	Frozen Pelagic Fish (Bullet Tuna, Shortfin Scad, Skipjack, Spanish Mackerel)	38788	36720/11/SKP/BK/IV/2025	30/04/2025	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202411271704349497880/ NO: 912040174235600010011
9	CV. KING OF MILK FISH	Ikan Demersal Beku (Bawal Hitam, Malong, Sembilang, Manyung, Layur, Sukang, Bawal, Kakap)	Frozen Demersal Fish (Black Pomfret, Conger Eel, Eel Tailed Catfish, Giant Catfish, Hairtail, Leatherjacket, Pomfret, Snapper)	38787	36719/11/SKP/BK/IV/2025	30/04/2025	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202411271713184173186/ NO: 912040174235600010012
10	CV. KING OF MILK FISH	Cephalopoda Beku (Sotong, Gurita, Cumi-cumi)	Frozen Cephalopods (Cuttlefish, Octopus, Squid)	38786	36718/11/SKP/BK/IV/2025	30/04/2025	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202411280938183001330/ NO: 912040174235600010015
11	CV. KING OF MILK FISH	Cephalopoda Segar (Sotong, Gurita, Cumi-cumi)	Fresh Cephalopods (Cuttlefish, Octopus, Squid)	38785	36717/11/SKP/SG/IV/2025	30/04/2025	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202411280934439542362/ NO: 912040174235600010014
12	CV. KING OF MILK FISH	Rajungan Segar	Fresh Swimming Crab	38784	36716/11/SKP/SG/IV/2025	30/04/2025	A	Desa Raja, Kel. Raja, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202411280920454105521/ NO: 912040174235600010013
13	CV. PERMATALAUTNUSANTARA	Ikan Kayu	Katsubushi	38660	36592/11/SKP/AS/IV/2025	23/04/2025	B	Pahlawan Kab. Aceh Barat, Kel. Suak Sigadeng, Kec. Johan Pahlawan Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202412301419182318458/ NO: 270524002079600010003
14	PT. YAKIN PASIFIK TUNA	Tuna Beku	Frozen Tuna	39154	37086/11/SKP/BK/V/2025	26/05/2025	A	Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202503121336524213692/ NO: 912010637230200080020
15	PT. YAKIN PASIFIK TUNA	Ikan Demersal Beku (Kambing-kambing, Kerapu, Layur, Kakatua, Bawal,	Frozen Demersal Fish (Emperor Angelfish, Grouper, Hairtail, Parrotfish, Pomfret, Snapper,	39153	37085/11/SKP/BK/V/2025	26/05/2025	A	Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202503121337491397093/ NO: 912010637230200080022
16	PT. YAKIN PASIFIK TUNA	Fillet Ikan Demersal Beku (Kambing-kambing, Kerapu, Layur, Kakatua, Bawal,	Frozen Demersal Fish Fillet (Emperor Angelfish, Grouper, Hairtail, Parrotfish, Pomfret, Red	39152	37084/11/SKP/BK/V/2025	26/05/2025	A	Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202503121338117464034/ NO: 912010637230200080023
17	PT. YAKIN PASIFIK TUNA	Ikan Demersal Utuh Beku	Frozen Whole Demersal Fish	39151	37083/11/SKP/BK/V/2025	26/05/2025	A	Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202503112039348183386/ NO: 912010637230200080010
18	PT. YAKIN PASIFIK TUNA	Steak Tuna Beku	Frozen Tuna Steak	39150	37082/11/SKP/BK/V/2025	26/05/2025	A	Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202503111956283253712/ NO: 912010637230200080009
19	PT. YAKIN PASIFIK TUNA	Tuna Cubes Beku	Frozen Cubes Tuna	39149	37081/11/SKP/BK/V/2025	26/05/2025	A	Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202503112137503243228/ NO: 912010637230200080012

20	PT. YAKIN PASIFIK TUNA	Tuna Loin Beku	Frozen Tuna Loin	39148	37080/11/SKP/BK/V/2025	26/05/2025	A	Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202503112137124071838/ NO: 91201063723020080011
21	PT. YAKIN PASIFIK TUNA	Tuna Saku Beku	Frozen Tuna Saku	39147	37079/11/SKP/BK/V/2025	26/05/2025	A	Samudera (PPS) Kutaraja, Jl. Sisingamangaraja Ujung Lampulo, Aceh	Aceh	Disetujui/ ID: I-202503121143207602530/ NO: 91201063723020080015

Perhitungan setiap unsur terlebih dahulu dilakukan masing-masing dengan membandingkan jumlah target atau permohonan dari setiap jenis layanan sertifikasi sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dibagi dengan jumlah sertifikat yang memenuhi persyaratan dan atau diterbitkan dari layanan tersebut. Pada periode triwulan II kegiatan permohonan HACCP tidak dilakukan perhitungan karena tidak ada permohonan dan penerbitan sertifikat baru. Berdasarkan arahan tim pusat pada tahun 2025 kegiatan monitoring HACCP tetap dilaksanakan, namun tidak lagi menjadi bagian capaian pendukung indikator ini. Kegiatan yang telah dilaksanakan dan dilakukan perhitungan yaitu terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Berikut perhitungan indikator kinerja tersebut :

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) :

- Permohonan SKP Tahun 2025 Triwulan II = 21
- SKP Yang Diterbitkan Tahun 2025 Triwulan II = 21
- Persentase Capaian SKP : $(B) = \frac{21}{21} \times 100 \% = 100 \%$

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 triwulan II sebagai berikut:

$$\% X = \frac{100}{1} \times 100 \%$$

$$\% X = 100 \%$$

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Sesuai dengan data kinerja, capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh sama besarnya dengan periode triwulan I sebesar 100 %. Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan data kinerja tahun 2024 capaian indikator kinerja periode ini sebesar 106,66 %. Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2023 tidak terdapat indikator kinerja ini dalam dokumen kinerja.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra 2025 – 2029 belum dapat dilakukan sampai dengan penyusunan laporan ini.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum Indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2025 triwulan II. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja diharapkan dapat terwujud dengan penerapan rencana aksi dan dukungan pihak-pihak terkait

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan, baik pada kegiatan inspeksi dan verifikasi maupun monitoring dan evaluasi secara digital.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran, indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh melalui anggaran kegiatan validasi produk pada sektor produksi pasca panen sebesar Rp. 34.320.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.681.060,- atau senilai 48,60 %.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh diantaranya yaitu : melakukan inventarisasi masa berlaku HACCP dan SKP semua UPI; membuat program terkait *schedule* perpanjangan sertifikat HACCP; melakukan update data-data terkait; meningkatkan kapasitas SDM; serta meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak UPI. Berikut dokumentasi kegiatan yang terkait indikator kinerja ini.

Gambar 7 Kegiatan Sektor Produksi Pasca Panen Tahun 2025 Triwulan II



IKS 3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil kelautan dan perikanan.

Monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya tidak hanya merupakan salah satu upaya dalam mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjawab tantangan global dimana tuntutan masyarakat terhadap bahan pangan yang aman dan bergizi semakin meningkat. Kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya dilakukan di pelabuhan perikanan, pasar dan *supplier/miniplant*, ini sebagai upaya pencegahan sebelum bahan pangan sampai kepada konsumen sehingga ketahanan pangan dan keamanan pangan secara global dapat terwujud.

Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di Kabupaten/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

Pengambilan contoh produk perikanan yang diperdagangkan di pasar tradisional dan modern yang dilakukan oleh Inspektur Mutu bersama dengan pihak pengelola pasar tradisional dan pasar modern. Contoh tersebut selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap suhu, organoleptik, uji kimia dan mikrobiologi di laboratorium yang terakreditasi. Selain itu, dilakukan juga pengamatan kondisi sarana prasarana dari lokasi usaha yang menjadi objek pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk menilai penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi domestik.

1. Capaian Indikator Kinerja

Monitoring penjaminan mutu perikanan domestik terus dilaksanakan oleh SKIPM Aceh. Pada tahun 2025 dilakukan monitoring penjaminan mutu perikanan domestik dalam bentuk kegiatan "Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sentra Penyedia Pangan Sehat di pasar domestik yang berlokasi di Kota Banda Aceh. Sentra penyedia pangan sehat yang menjadi lokus adalah pasar dan pelabuhan perikanan. Lokasi pelaksanaan implementasi Inpres Nomor 01 Tahun 2017 dengan lokasi pelaksanaan di 1 (satu) kabupaten/kota, yaitu Kota Banda Aceh dengan lokus PPS Kutaradja dan Pasar Seutui. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun atau dengan periode pelaporan pada tiap semester. Berdasarkan laporan perhitungan yang telah dilakukan verifikasi oleh tim pusat untuk lokasi Kota Banda Aceh diperoleh hasil nilai sebagai berikut :

- Nilai sarana dan prasarana = 50,00
- Nilai pengujian produk = 94,39
- Penilaian jaminan mutu = $(60\% \times \text{nilai sarana prasarana}) + (40\% \times \text{nilai pengujian})$
= $(60\% \times 50,00) + (40\% \times 94,39)$
= 67,76 %

Secara sederhana dapat dinyatakan jaminan mutu keamanan produk perikanan di Kota Banda Aceh pada semester I tahun 2025 sebesar 67,76 % dalam kriteria yang memenuhi persyaratan, sedangkan 32,34 % dalam kriteria yang belum memuaskan.

Gambar 8 Kegiatan Pengambilan Sampel Ikan dan Monitoring Penjaminan Mutu Perikanan Domestik di Kota Banda Aceh Tahun 2025 Semester I



Tabel 7 Target dan Realisasi IKS 01.03 Tahun 2025 Triwulan II

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025					Renstra 2025 - 2029		
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Lokasi	-	-	-	2	-	-	1	1	100	1	100	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Indikator kinerja pada periode sebelumnya menggunakan satuan lokasi dan cara perhitungan yang berbeda dengan periode tahun 2025. Berdasarkan tabel data realisasi indikator kinerja ini serta data pada kinerja pada tahun 2024, periode yang sama triwulan I belum dilakukan perhitungan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik. Jika diperbandingkan dengan data tahun 2024 kegiatan dilaksanakan di 2 lokasi kabupaten/kota sesuai dengan target yang telah ditetapkan namun diperhitungkan kembali dalam bentuk persentase. Pada periode tahun 2025 triwulan II atau semester I indikator kinerja ini telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebanyak 1 lokasi (Kota Banda Aceh)

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh yang terdapat pada dokumen Renstra belum dapat dilakukan perhitungan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Perlu peningkatan pemahaman terkait Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. SKIPM Aceh berusaha dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dari indikator ini baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan dukungan dari pihak-pihak terkait.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan ini yaitu dengan melibatkan personil tambahan non teknis dengan pengalaman yang cukup, serta dengan persiapan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh personil.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Tahun 2025 mengalami efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik adalah dengan melanjutkan kegiatan pengujian dan penyusunan laporan semester I. Selain itu peningkatan pemahaman terkait Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat, koordinasi dan persiapan pelaksanaan periode selanjutnya.

IKS 4. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Untuk mendukung pelaksanaan ekspor, pada periode triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Aceh melakukan evaluasi UPI Yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terhadap beberapa UPI yaitu : PT. Holi Mina Jaya; PT. Perikanan Indonesia Unit Simeulue; PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari dan CV, Aneuk Agam Ayah sampai dengan terbitnya Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS).

Berikut formula yang digunakan untuk melakukan perhitungan indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 :

$$x = \frac{A-B}{A} \times 100 \%$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2024 indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah ditentukan target dan periodenya. Pada periode Tahun 2025 semester I indikator ini sudah dilakukan perhitungan. Data Ekspor SKIPM Aceh Tahun 2025 Periode Bulan Januari Sampai dengan Juni adalah sebagai berikut :

A = HC yang diterbitkan oleh SKIPM Aceh Semester I = 5

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan = 0

$$x = \frac{5-0}{5} \times 100 \% \qquad x = 100 \%$$

Tabel 8 Data Jumlah Sertifikasi Ekspor Tahun 2025 Semester I

NO.	TANGGAL	NO. AJU	NO. SERTIFIKAT	NO. SERI SERTIFIKAT	NAMA PENGIRIM	ALAMAT PENGIRIM	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KOMODITI	TUJUAN	JUMLAH		NILAI KOMODITI
											Mati (kg)	Hidup (ekor)	
1	17/01/2025	E/E/41.0/20250117/000002	41.0-0001-2025	220007028	PT. Perikanan Indonesia	Jl. Muara Baru Ujung perenjangan, Jakarta Utara	Nomura Trading CO., LTD	4-3-13 Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan	Gurita	Jepang	15200	0	Rp1.328.708.000
2	14/02/2025	E/E/41.0/20250214/000003	41.0-0002-2025	22000709	PT. Perikanan Indonesia	Jl. Muara Baru Ujung perenjangan, Jakarta Utara	Nomura Trading CO., LTD	4-3-13 Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan	Gurita	Jepang	15018,5	0	Rp1.396.720.500
3	26/03/2025	AE/41.08/202500008	41.0-S-0010-2025	250000346	PT. Perikanan Indonesia	Jl. Muara Baru Ujung perenjangan, Jakarta Utara	Nomura Trading CO., LTD	4-3-13 Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan	Gurita	Jepang	16100	0	Rp1.585.947.600
4	02/05/2025	AE/41.0V/202500009	41.0-S-0011-2025	250000347	PT. Perikanan Indonesia	Jl. Muara Baru Ujung perenjangan, Jakarta Utara	Nomura Trading CO., LTD	4-3-13 Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan	Gurita	Jepang	6960	0	Rp617.314.500
5	26/06/2025	AE/41.0V/202500012	41.0-S-0012-2025	250000348	PT. Perikanan Indonesia	Jl. Muara Baru Ujung perenjangan, Jakarta Utara	Nomura Trading CO., LTD	4-3-13 Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan	Gurita	Jepang	24.040	0	Rp2.361.641.520
TOTAL											77.318	0	Rp7.290.332.120

Tabel 9 Target dan Realisasi IKS 01.04 Tahun 2025 Semester I

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2020-2024	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW II / S I	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	-	-	-	100	-	99	100	101,01	99	101,01	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data kinerja SKIPM Aceh pada periode tahun 2024, terdapat indikator kinerja terkait ekspor yaitu Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Karantina dengan target sebesar 98 % dan capaian sebesar 100 %. Indikator ini adalah indikator baru yang sesuai dengan dokumen kinerja tahun 2024 periode bulan Oktober. Sedangkan pada tahun 2025 indikator kinerja ini dilakukan perhitungan dengan periode semester sesuai dengan dokumen manual indikator kinerja. Capaian pada tahun 2025 triwulan II atau semester I dengan perhitungan nilai posisi akhir adalah sebesar 100 %.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan Renstra belum dapat dilakukan karena masih dalam penyusunan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah dilaksanakan dengan maksimal dan sesuai dengan ketentuan. Pada ekspor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor, dalam pelaksanaannya merujuk pada Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Pada kegiatan ekspor hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor, terdapat beberapa isu, diantaranya yaitu : pengguna layanan belum mengetahui persyaratan ekspor ke negara tujuan ekspor dan fenomena musim sehingga hasil tangkapan ikan nelayan berkurang menyebabkan volume produksi ikut berkurang.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kinerja indikator ini yaitu dengan melakukan efisiensi jumlah personil dengan jabatan inspektu mutu 8 orang dan 1 pranata komputer yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat program penggunaan teknologi atau sistem informasi baru untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan ekspor.

6. Realisasi Anggaran

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan terkait ekspor diantaranya yaitu Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor dengan pagu anggaran dan kegiatan Produk Perikanan yang Diawasi dan Diselesaikan Kasus Mutu Ekspor Impor-nya dalam efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dengan meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan koordinasi lingkup internal BPPMHKP serta melakukan sosialisasi eksternal ke pengguna jasa dan *stakeholder* terkait. Serta *update* penggunaan aplikasi SIAP Mutu BPPMHKP yang secara bertahap dilakukan penyempurnaan oleh tim pusat.

Gambar 9. Diskusi Bersama Dengan Bea Cukai Mengenai Penerbitan SMKHP



IKS 5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk presentase, berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi

atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen.

Berikut formula perhitungan indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

X = Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2, 3, ..., n

n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025, tanggal 12 Maret 2025 SKIPM Aceh bersama Komite Akreditasi Nasional telah melaksanakan kegiatan Asesmen dan *Witness* dengan kriteria persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan persyaratan lainnya / Dokumen APAC/ILAC dengan secara remote. Pada triwulan I tahun 2025 SKIPM Aceh telah menyelesaikan prosedur administrasi pembayaran iuran tahunan. Pada periode tahun 2025 triwulan II indikator kinerja ini belum dilakukan perhitungan, karena mempergunakan metode nilai posisi akhir pada periode tahunan.

Pada periode ini telah dilaksanakan klarifikasi atas temuan ketidaksesuaian pada kegiatan *Asesmen* dan *Witness* serta mengikuti seluruh tahapan dalam kegiatan dari Komite Akreditasi Nasional. Stasiun KIPM Aceh telah mendapatkan surat pemberitahuan hasil surveilan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) melalui surat nomor : 2379/3.b1/LP/05/2025 tanggal 14 Mei 2025. Melalui surat tersebut dinyatakan bahwa KAN telah memutuskan untuk mempertahankan status akreditasi kepada Stasiun KIPM Aceh dengan No. Akreditasi LP-713-IDN dengan ruang lingkup sesuai dengan lampiran di bawah ini.

Gambar 10 Amandemen Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025

Tabel 10 Target dan Realisasi IKS 02.01 Tahun 2025 Triwulan II

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025-2029		
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%	
1	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2024 terdapat indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM

Aceh, dengan nilai capaian sebesar 81,35. Pada tahun 2024 Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP telah melakukan pengukuran lingkup UPT terhadap nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sebanyak unit sampling 13 laboratorium dengan capaian nilai sebesar 81,35. Pada periode triwulan II indikator kinerja ini belum dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya, karena merupakan indikator kinerja baru dan masih terus dalam koordinasi dengan pusat BPPMHKP.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra capaian dari indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah diupayakan secara maksimal agar dapat tercapai atau melebihi target pada periode tahunan. Pada periode tahun 2025 triwulan II belum dapat dilakukan perbandingan dengan dokumen renstra terbaru karena masih dalam proses penyusunan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian dari indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah diupayakan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan mengikuti pelaksanaan asesmen dan memenuhi seluruh klarifikasi yang diperlukan sehingga kembali mendapatkan status akreditasi kepada Stasiun KIPM Aceh dengan No. Akreditasi LP-713-IDN dengan ruang lingkup sesuai dengan lampiran yang diperoleh.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dalam bentuk efisiensi penggunaan berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2025, indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh didukung dengan kegiatan Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji yang memiliki anggaran setelah efisiensi yaitu sebesar Rp. 39.500.000,- dengan nilai serapan sebesar Rp. 11.065.000,- atau setara dengan 28,01 % dari pagu anggaran terbaru.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah dengan pelaksanaan program dan rencana kegiatan; meningkatkan koordinasi internal baik di UPT maupun pusat BPPMHKP.

IKS 6. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum;
2. Persyaratan Struktural;
3. Persyaratan Sumberdaya;
4. Persyaratan Proses;
5. Persyaratan Sistem Manajemen.

Berikut formula perhitungan indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

X = Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2, 3, ..., n

n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Pada tanggal 2 sampai 3 September 2024 SKIPM Aceh telah melaksanakan re-akreditasi Lembaga Inspeksi SNI ISO 17020:2012 bersama Komisi Akreditasi Nasional (KAN) dan telah menyelesaikan seluruh tahapan yang telah ditentukan. Sehingga dapat diterbitkan Sertifikat Akreditasi dengan nomor LI-153-IDN yang berlaku sampai dengan 18 November 2029. Dengan tipe lembaga inspeksi tipe A, pada bidang inspeksi dan sub bidang inspeksi: perikanan (surveilans HACCP).

Selain itu dilakukan juga pengukuran nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sebanyak 14 lembaga inspeksi dengan capaian nilai sebesar 84,85. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, perhitungan nilai capaian indikator kinerja Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT yang dapat dipergunakan oleh Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2024 menggunakan capaian rata-rata yaitu sebesar 83,10 atau setara dengan 118,71 % dari target sebesar 70 %.

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025, indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh belum dilakukan perhitungan. Pada triwulan II tahun 2025 SKIPM Aceh telah menyelesaikan prosedur administrasi pembayaran iuran tahunan dan mengikuti arahan dari pusat.

Tabel 11 Target dan Realisasi IKS 02.02 Tahun 2025 Triwulan II

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh belum dapat dilakukan perbandingan, selanjutnya akan dilaksanakan pada triwulan IV atau periode tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra capaian dari indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh terus diupayakan secara maksimal agar dapat tercapai atau melebihi target pada periode tahunan. Pada periode tahun 2025 triwulan II belum dapat dilakukan perbandingan dengan dokumen renstra terbaru.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian dari indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah diupayakan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan mengikuti arahan dari pusat BPPMHKP.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dalam bentuk efisiensi penggunaan berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2025, indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh didukung dengan kegiatan Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi yang memiliki anggaran setelah efisiensi yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- dengan nilai serapan sebesar Rp. 3.000.000,- atau setara dengan mendekati 30 % dari pagu anggaran terbaru.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah dengan pelaksanaan program dan rencana kegiatan; meningkatkan koordinasi internal baik di UPT maupun pusat BPPMHKP.

IKS 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Aspek pengukuran IKPA meliputi aspek :

kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Secara teknis aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satker dengan fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Hal-hal penting dalam perhitungan indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10 %

- ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekwensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekwensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
 - ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
 - ✓ Semakin rendah frekwensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik
2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10 %
- ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
 - ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan, khusus triwulan 1 batas pemutakhiran adalah 10 hari kerja bulan Februari
 - ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA semakin baik
3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20 %
- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
 - ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
 - ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
4. Dispensi SPM – Bobot Penilaian 5 %
- ✓ Dispensi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM yang disampaikan ke KPPN dan telag diterbitkan SP2D nya pada triwulan IIV
 - ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio dispensasi SPM sebagaimana berikut :

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

1. Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mempunyai target dengan pengukuran secara semester. Pada tahun 2025 triwulan II atau semester I indikator ini telah dilakukan perhitungan, indikator kinerja ini memiliki target tahunan dengan nilai sebesar 92, dan target semester I sebesar 85. Capaian indikator tersebut sesuai dengan data dari aplikasi OM-SPAN modul Monev PA yang dikelola oleh Kementerian Keuangan diperoleh capaian sebesar 98,65. Berdasarkan data capaian seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan semester I tahun 2025, melalui Nota Dinas dari Sekretariat Jenderal Nomor 1725/SJ/RC.610/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 SKIPM Aceh menempati urutan ke 50 (lima puluh) dari sejumlah 380 satuan kerja. Berikut ditampilkan tangkap layar dari MONEV PA Kemenkeu, serta tabel target dan realisasi capaian indikator kinerja ini.

Gambar 11 Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Semester II

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DPA	DEVIASI HALAMAN II DPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP					
1	001	032	648509	STASUSI KARANTINA BAKAL PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	Nilai	100.00	92.88	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	78.92	80%	0.00	98.65
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Akhrib	98.40			100.00			100.00				

Tabel 12 Target dan Realisasi Realisasi Nilai IKPA Tahun 2025 Triwulan II / Semester I

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW II / S I	Realisasi S I	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	98,28	97,02	96,17	97,47	98,41	-	85	98,65	116,06	92	107,23	-	-

Gambar 12 Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Central Government Advisory Tahun 2025

Kegiatan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Central Government Advisory Bulan Juni Tahun Anggaran 2025
Kamis, 12 Juni 2025

IKPA PERIODE MEI 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KKP ACEH

Kode Unit	Unit Kerja	Revisi DIPA	Revisi Mutasi dan DIPA	Penyempitan Anggaran	Belanja Realisasi	Penyempitan Tagihan	Penyempitan SIP dan TSP	Capaian Output	Dispersasi SIP	Nilai Akhir
800804	STASIUN KARANTENA IKPA PENUNDAIAN MUTU DAN KESEHATAN DAN PERIKANAN ACEH	300	300	300	0	0	300	300	0	300
807803	BALAI PERIKANAN BENDAYA AIR PATAU LUMBAY KATES	300	32,03	300	0	0	300	300	0	66,9
827503	SEKOLAH USARA PERIKANAN MENDONG GADONG	300	89,88	89,88	0	0	300	300	0	97,92
892003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RANGGONG ACEH (DUSURONG)	300	300	30	0	0	0	300	0	93,71
800070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RANGGONG ACEH (DUSURONG)	300	300	30	0	0	0	300	0	93,71
1005120	BANGKALAN SENDI LAMPULO	300	300	82,4	300	200	81,61	61,15	0	85,12
1005140	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RANGGONG ACEH (DUSURONG)	300	80	30	0	0	0	300	0	77,39

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada periode tahun 2024 terdapat nilai capaian sebesar 98,41. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan nilai capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 triwulan II nilai indikator kinerja IKPA Stasiun KIPM Aceh tercapai sebesar 98,65 dari target semester I sebesar 85 dan target tahunan sebesar 92.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) belum dapat direbandingkan dengan dokumen Renstra karena masih dalam tahap penyusunan sampai dengan laporan ini dibuat.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian Indikator Kinerja telah dilakukan upaya seluruh tim di SKIPM Aceh untuk melakukan pemenuhan ketentuan yang menjadi indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi. Selain itu terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal, namun terdapat sebagian yang mengalami efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan SKIPM Aceh untuk meningkatkan nilai IKPA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM untuk periode mendatang.

IKS 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator

Target Akhir Tahun Anggaran 2025 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Secara otomatis nilai capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dapat diperoleh melalui aplikasi monev Kemenkeu di halaman <https://monev.kemenkeu.go.id/> yang terkoneksi juga dengan aplikasi SAKTI. Sedangkan secara manual formula perhitungan indikator kinerja ini dapat dilihat dalam tampilan dibawah ini :

Cara Perhitungan:

NKA Unit Eselon I

NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektivitas

1) Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

- CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
- RIKSS_i : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
- TIKSS_i : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
- n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2) Nilai Efektivitas Satker

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

- NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker
- RVRO_i : Realisasi Volume RO i
- TVRO_i : Target Volume RO i
- n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

$$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

- NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
- CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
- NEf_{satker} : Nilai Efektivitas Satker
- NE_{satker} : Nilai Efisiensi Satker
- W_{CIKP} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
- WNEf_{satker} : Bobot Nilai Efektivitas Satker

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025 triwulan II indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran belum dilakukan penilaian. Nilai kinerja ini diperoleh dari aplikasi monev Kemenkeu yang telah terkoneksi dengan aplikasi SAKTI.

Tabel 13 Target dan Realisasi IKS 03.02 Tahun 2025 Triwulan II

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	-	-	-	-	92,50	-	-	-	-	71,5	-	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2024 terdapat indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang dilakukan secara otomatis perhitungan melalui <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Namun nilai ini tidak dapat diperbandingkan dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2025, karena belum dilakukan perhitungan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2025 triwulan II belum dilakukan perhitungan dan diperbandingkan dengan Renstra terbaru, karena masih dalam penyusunan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Pada tahun 2025 triwulan II Analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah disebabkan oleh adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan dilakukan monitoring secara berkala terhadap penyerapan anggaran, konsistensi dan capaian output.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi. Selain itu terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal, namun terdapat sebagian yang mengalami efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan SKIPM Aceh untuk meningkatkan nilai NKPA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan dalam pelaporan di aplikasi SAKTI serta melakukan strategi untuk menjaga konsistensi rencana penarikan (awal) dengan realisasi anggaran serta rencana penarikan anggaran (revisi). Selain itu meningkatkan konsistensi penginputan capaian realisasi output (CRO) secara periodik atau perbulan, yang mana mewajibkan partisipasi seluruh satuan kerja pelaksana anggaran untuk melakukan entri data pada aplikasi SAKTI yang terintegrasi antara lain memuat program, realisasi anggaran dan volume output kegiatan, serta mencakup variabel penyerapan, konsistensi, CRO, dan efisiensi. Selain itu dilakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan indikator kinerja melalui <https://monev.kemenkeu.go.id>.

IKS 9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal 6 ayat (3) UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Formula yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah sebagai berikut :

Jumlah Rekomendasi BPK Lingkup UPT..... Yang Ditindaklanjuti X 100%

Jumlah Total Rekomendasi BPK Lingkup UPT

1. Capaian Indikator Kinerja

Sampai dengan akhir periode tahun 2025 triwulan II tidak ada audit yang dilaksanakan secara langsung oleh BPK di Stasiun KIPM Aceh. Telah dilakukan upaya pemenuhan seluruh dokumen serta data dukung yang diperlukan sesuai arahan secara online. Berikut data target dan realisasi indikator kinerja pada periode tahun 2025 triwulan II ini.

Tabel 14 Target dan Realisasi IKS 03.03 Tahun 2025 Triwulan II

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW I I	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh/ Persen.	-	-	-	100	100	100	-	-	-	100	-	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Pada tahun 2024 terdapat capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK sebesar 100 %. Pada periode tahun 2025 triwulan II belum dilakukan perhitungan capaian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 belum dapat dilakukan, karena dokumen Renstra masih dalam penyusunan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk. Selain itu terdapat efisiensi lainnya, karena indikator kinerja ini secara khusus tidak didukung dengan anggaran yang khusus terkait temuan BPK, namun dapat dikategorikan masuk komponen dukungan manajemen internal pada kegiatan pemantaun dan evaluasi.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk.

6. Realisasi Anggaran

Pada sisi anggaran indikator kinerja ini dapat dikategorikan masuk pada anggaran gabungan di dukungan manajemen internal, namun sebagian mengalami efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK adalah dengan melakukan pemenuhan seluruh dokumen data dukung atau laporan keuangan sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.

IKS 10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercermin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis melalui sistem yang telah ditentukan.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada beberapa peraturan : 1). Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.; 2). Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara: dan 3). Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM. 02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Formula perhitungan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Dimensi kualifikasi pendidikan; kompetensi, kinerja pada jabatan ditampilkan pada matrik berikut ini.

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	DI Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10		

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Stasiun KIPM Aceh mempergunakan data ropeg.kkp.go.id yang terintegrasi dengan sistem SIASN BKN untuk memperoleh nilai capaian IP ASN dengan periode perhitungan semesteran. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut :

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level II} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025 triwulan II, indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, belum dilakukan perhitungan capaian. Berdasarkan data pada ropeg.kkp.go.id tahun 2024, target dari indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh mengalami penurunan dari periode sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 8, serta dengan target periode semester II tahun 2025 sebesar 75 Capaian nilai tersebut dicapai atas kerjasama seluruh pegawai SKIPM Aceh yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat terkait kompetensi yang dapat meningkatkan profesionalitas kinerja.

Gambar 13 Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Semester I 2025

The screenshot shows the 'IP ASN 2025' dashboard. A search bar contains 'Aceh' and a 'Cari' button. Below is a table with the following data:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STASIUN KIPM ACEH	15	23.33	93.32 %	33.33	83.32 %	25	83.33 %	5	100 %	86.67	TINGGI

Tabel 15 Target dan Realisasi IKS 03.04 Tahun 2025 Triwulan II

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Indeks	81,57	82,36	83,45	89,89	91,94	-	75	86,67	115,56	87	99,62	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 terdapat penurunan capaian dari 91,94 pada tahun sebelumnya menjadi 85 pada semester I 2025. Pada periode yang sama tahun 2024 capaian nilai IP ASN Stasiun KIPM Aceh sebesar 90,34, sedangkan pada periode tahun 2025 adalah sebesar 86,67.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh belum dapat diperbandingkan capaiannya dengan dokumen Renstra karena masih dalam tahap penyusunan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN menjadi salah satu indikator kinerja utama yang terus mendapat perhatian dari seluruh pegawai. Selain itu Kepala SKIPM Aceh berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk dapat meningkatkan kompetensi untuk mendukung kinerjanya. Terdapat upaya partisipasi seluruh pegawai dalam pelaksanaan bimbingan teknis atau diklat yang diselenggarakan oleh pusat BPPMHKP maupun instansi lain yang terkait.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Seluruh pegawai memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk mengikuti seminar, pelatihan dan bimbingan teknis terkait secara *daring*. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh BPPMHKP, Unit eselon lain, e-milea KKP maupun penyelenggara eksternal lainnya.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN tidak secara khusus dialokasikan. Terdapat pagu anggaran dukungan manajemen internal namun sebagian mengalami efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Aceh adalah dengan melakukan konsolidasi internal lingkup SKIPM Aceh serta melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan serta melakukan monitoring evaluasi secara periodik terhadap data IP ASN seluruh pegawai. Selanjutnya secara mandiri setiap pegawai PNS melakukan input data pada portal BKN dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh operator yang telah ditunjuk. Hal ini akan terus dilakukan pada periode selanjutnya.

IKS 11. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Aceh dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya terdapat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Selanjutnya telah disusun juga Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2025 Lingkup BPPMHKP.

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%). Penilaian evaluasi AKIP dilakukan secara berjenjang menggunakan LHE yang terdapat pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi Kinerja KKP. Evaluasi atas AKIP dilaksanakan dengan melakukan input komponen/sub komponen/kriteria beserta bukti data dukung dan link data dukung. Nilai

Penilaian Mandiri SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP. Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP.

1. Capaian Indikator Kinerja

Tabel 16 Target dan Realisasi IKS 03.05 Tahun 2025 Triwulan II

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	-	-	87,40	-	-	85,50	-	-	-	-	86	-	-

Pada tahun 2025 triwulan II indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh belum dilakukan perhitungan, karena menggunakan perhitungan periode tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Pada tahun 2024 ini telah dilakukan penilaian secara mandiri oleh Sekeretaryat BPPMHKP bersama dengan Tim Penilai Internal lingkup KKP melalui LKE yang terdapat pada <https://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan data capaian SAKIP lingkup BPPMHKP, SKIPM Aceh menempati urutan tinggi (senilai 85,50) (A). Nilai ini menempati nilai teratas jika dibandingkan dengan unit pelaksana teknis lainnya di seluruh Indonesia.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target Penilaian Mandiri SAKIP merupakan indikator kinerja yang tidak setiap tahun masuk dalam dokumen kinerja. Penilaian mandiri SAKIP telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup BKIPM pada tahun 2024. Terdapat unit kerja yang menjadi *sampel* uji petik penilaian SAKIP secara langsung yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal lingkup KKP. Pada tahun 2025 triwulan II indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh belum dapat diperbandingkan dengan dokumen Renstra terbaru.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah didukung oleh keterlibatan pimpinan dalam setiap unsur AKIP, pemenuhan

dokumen, peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja internal. Diperlukan peningkatan sumber daya pengelola kinerja baik melalui diklat atau bimbingan teknis baik secara langsung maupun online. Pada bulan Juni telah dilaksanakan Launching Pelatihan SAKIP KKP dan dilanjutkan dengan pelatihan SAKIP melalui E Milea KKP oleh seluruh pegawai Stasiun KIPM Aceh telah mengikuti pelatihan ini dan mendapatkan sertifikat pelatihan.

Gambar 14 Pelatihan SAKIP E Milea KKP



5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk. Selain itu

terdapat efisiensi lainnya, karena indikator kinerja ini secara khusus tidak didukung dengan anggaran yang khusus terkait SAKIP, namun dapat dikategorikan masuk komponen dukungan manajemen internal dan kegiatan terkait arsip.

6. Realisasi Anggaran

Pada sisi anggaran tidak terdapat alokasi anggaran khusus terkait dukungan manajemen yang mendukung indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh sebagian mengalami revisi dalam rangka efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan konsolidasi internal serta melakukan penyusunan dan pengumpulan dokumen akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan sehingga dapat digunakan sebagai data pendukung penilaian SAKIP SKIPM Aceh yang sudah mulai dilaksanakan pada triwulan II.

IKS 12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I tahun s.d Triwulan II Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, dihitung dengan periode triwulanan dan menggunakan jenis atau pola perhitungan target atau realisasi data

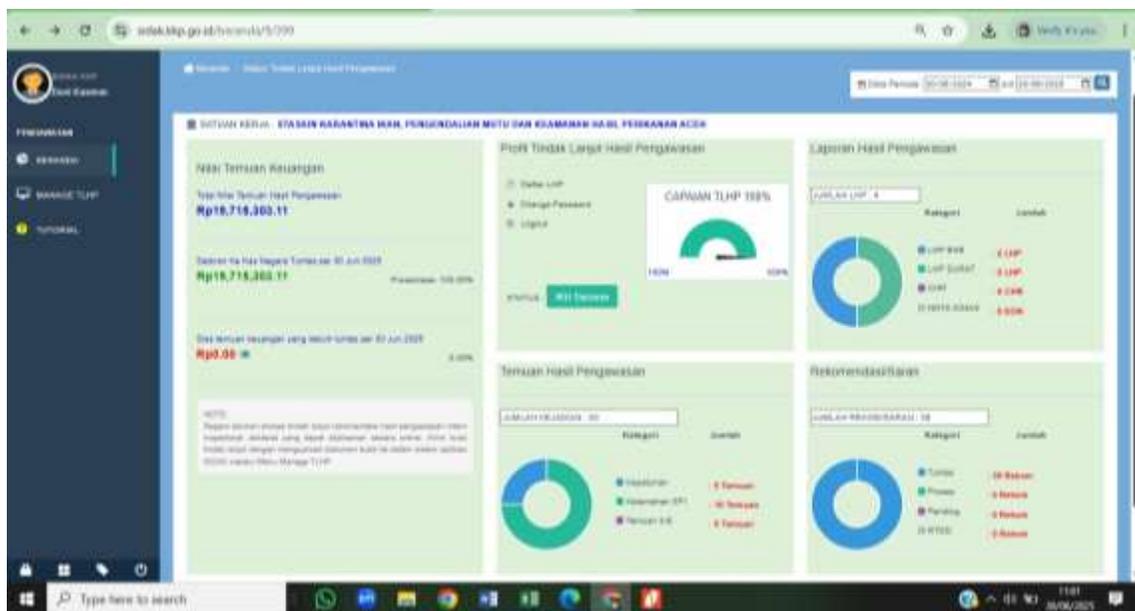
nilai posisi akhir. Indikator ini diperoleh berdasarkan data aplikasi SIDAK KKP secara otomatis. Berikut komponen perhitungan unsur serta tampilan gambar aplikasi SIDAK KKP tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Rumus Perhitungan} = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100 \%$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

Gambar 15 Capture Aplikasi Sidak KKP SKIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan II



Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2025 diperoleh sebesar 100 %. Pada tahun 2024 SKIPM Aceh menjadi salah satu lokasi pengawasan audit oleh Inspektorat Jenderal KKP. Berdasarkan audit kinerja tersebut, SKIPM Aceh telah berupaya menindaklanjuti hasil temuan audit kinerja. Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2025, seluruh temuan dari pengawasan yang dilaksanakan telah selesai ditindaklanjuti. Berdasarkan data tersebut, capaian nilai TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja adalah berstatus "SUKSES" dengan capaian sebesar 100 % dari target sebesar 85 %, Data tersebut bisa dilihat dari

tampilan pada *dash board* aplikasi SIDAK (<http://sidak.kkp.go.id/login>) yang menjelaskan tindak lanjut hasil pengawasan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Tabel 17 Target dan Realisasi IKS 03.06 Tahun 2025 Triwulan II

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	100	100	100	100	100	85	100	117,65	85	117,65	-	-

1. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja tahun 2025, SKIPM Aceh mencatat capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I yang diperoleh dari tangkapan layar portal SIDAK, nilai capaian pada Triwulan II tetap berada pada angka 100%, yang menunjukkan kondisi stabil dalam mengelola dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 belum dapat diperbandingkan dengan dokumen Renstra, karena masih terbit.

3. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh. Pada tahun 2025 triwulan II tidak terdapat obyek pengawasan. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai diperlukan agar seluruh rekomendasi atau saran yang diberikan dan dengan menyampaikan dokumen tindak lanjutnya secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal.

5. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi.

6. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan setiap periode dan melakukan tindak lanjut pemenuhan dokumen atas rekomendasi sesuai dengan ketentuan.

IKS 13. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup SKIPM Aceh. dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ RUP PBJ} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100 \%$$

1. Capaian Indikator Kinerja

SKIPM Aceh telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung indikator kinerja terkait Rencana Umum Pengadaan PBJ adalah sebagai berikut :

- Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen melakukan analisa terhadap pagu anggaran pada RKAKL tahun 2025, selanjutnya dilakukan generate dan penginputan tagging data Rencana Umum, serta melengkapi paket data penyedia dan non pengadaan (Perjalanan Dinas Keluali Paket Meeting, Hononarium, Jasa Profesi dan Narasumber RUP pada aplikasi SIRUP Pengadaan pada Januari 2025.
- Upaya koordinasi dan mengikuti zoom dengan pusat telah diikuti, selanjutnya setelah seluruh tahapan selesai dilakukan finalisasi draft paket Rencana Umum Pengadaan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Untuk selanjutnya dilakukan pengumuman paket RUP sesuai dengan tangkap layar kegiatan terkait .
- Hasil monitoring sementara realisasi penginputan data RUP Aceh telah sesuai dengan kebijakan pencatatan RUP 2025, Dimana pagu pengadaan barang/jasa sama nilainya dengan pagu RUP yang telah diumumkan.
- Pada Bulan Maret 2025 terdapat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, yang mewajibkan satuan kerja untuk melakukan revisi atas pagu RKAKL Tahun 2025. SKIPM Aceh telah melakukan upaya revisi sesuai Instruksi Presiden tersebut, dengan melakukan penyesuaian optimalisasi perencanaan PBJ data pada SIRUP.
- Melalui surat Sekretaris Jenderal (Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa) Nomor B.1/SJ.7/RC.420/IV/2025 tanggal 9 April 2025, perihal Hasil Tindak Lanjut Upaya Optimalisasi Perencanaan PBJ (RUP Terumumkan TA 2025). Pasca Instruksi Presiden tentang Efisiensi

Anggaran. Diperoleh informasi bahwa SKIPM Aceh telah lengkap/sesuai dalam melaksanakan identifikasi belanja pengadaan / belanja PBJ berdampak efisiensi anggaran.

- Melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal (Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa) Nomor 86/SJ.7/PL.410/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025, perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025.
- Pasca *cut off* data perhitungan triwulan 2, diperoleh informasi bahwa Unit Eselon I BPPMHKP telah lengkap/sesuai dalam mengumumkan pengadaan / belanja PBJ pada SIRUP atau sebesar 100 %.
- Seluruh Satuan Kerja Lingkup BPPMHKP Menggunakan Nilai Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT.
- Berikut tangkap layar pada daftar hasil identifikasi dan klarifikasi nilai belanja pengadaan terdapat efisiensi anggaran sesuai nota dinas.

Gambar 16 Data dan Dokumentasi Kegiatan Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan II



Pada tahun 2025 indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh mempunyai target sebesar 76 %. Indikator ini memiliki periode pelaporan secara triwulanan dan jenis perhitungan data akumulasi akhir. Berikut data target dan realisasi indikator tersebut.

Tabel 18 Target dan Realisasi IKS 03.07 Tahun 2025 Triwulan II

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	-	-	-	-	100	76	100	120	76	120	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal KKP Nomor B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, perihal Hasil Pengawasan Lainnya dalam rangka Penilaian Efektifitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 lingkup BPPMHKP. Penilaian tingkat kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP tahun 2024 adalah sebesar 84,34 %. Nilai tersebut merupakan gambaran kegiatan pengadaan barang/jasa stasiun kerja yang mewakili seluruh unsur yang menjadi parameter penilaian. Secara detail nilai tersebut terdiri dari unsur ketersediaan manajemen resiko sebesar 10 %; perencanaan dan persiapan sebesar 13,75 %; presentase pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui SPSE sebesar 10,00 %; kesesuaian tahap pelaksanaan sebesar 31,84 %; laporan penyelenggaraan PBJ sebesar 3,75 %; serta persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan sebesar 15 %.

Berdasarkan data capaian kinerja indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya, karena periode sebelumnya pendekatan lebih kepada tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh merupakan indikator baru pada tahun 2025 dan belum dapat diperbandingkan dengan dokumen Renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan tim pengadaan barang dan jasa terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan operasional perkatoran, dimana sebagian pagunya mengalami perubahan nilai karena efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah dengan membuat perencanaan realisasi pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan koordinasi dengan tim internal dan pusat terkait. Pada periode selanjutnya, SKIPM Aceh berupaya untuk terus meningkatkan nilai capaian indikator ini dengan melakukan koordinasi dengan tim Internal dan eksternal.

IKS 14. Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Mengacu pada Pedoman dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan: penetapan status unit kerja berpredikat Menuju WBK yaitu dengan memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 serta ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya terdapat Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Predikat yang diperoleh merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit pada lingkungan kerja. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM diharapkan tidak hanya dilakukan pada Unit Kerja yang menjadi *pilot project*, tapi juga dilakukan pada semua Unit Kerja yang berada di bawah tanggung jawab Unit Kerja eselon I, sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM hendaknya dapat memotivasi Unit Kerja lain untuk meningkatkan pembangunan Zona Integritas di Kementerian.

Untuk menjaga terpeliharanya predikat WBK/WBBM, maka perlu dilakukan pembinaan yang efektif. Pembinaan harus dilakukan terhadap Unit Kerja secara institusional dan terhadap pegawai pada Unit Kerja yang bersangkutan. Pembinaan terhadap Unit Kerja dapat dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan teknis, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa, mendapatkan prioritas tambahan anggaran dalam APBNP atau kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi. Selain itu juga dilakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan mengacu kepada PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai minimum untuk berpredikat WBK dicapai dengan evaluasi untuk memperoleh hasil nilai WBK ≥ 75 yang terdiri dari: Nilai Pengungkit yang diperoleh dari aspek Pemenuhan dan Reform (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik) dan Nilai Hasil yang diperoleh dari komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian Unit Kerja di lingkungan BPPMHKP dengan kriteria penilaian sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri dan menggunakan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Formula yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh adalah dengan menghitung prosentase nilai pembangunan integritas UPT diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal / BPPMHKP KKP.

1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2025 indikator mengalami perubahan menjadi Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh mempunyai target senilai 75. Pada tahun 2025 triwulan II belum dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja ini, karena target yang diperoleh menggunakan sistem perhitungan secara tahunan. Pada periode triwulan II seluruh komponen di SKIPM Aceh tetap berusaha menjaga konsistensi dan melakukan pembaharuan pemenuhan seluruh data dukung komponen pengungkit dan hasil secara berkala sesuai ketentuan.

Gambar 17 Kegiatan Rutin Apel Pagi dan *Briefing* Pembangunan Zona Integritas



Tabel 19 Target dan Realisasi IKS 03.08 Tahun 2025 Triwulan II

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025 - 2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	% Capaian
1	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tidak dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun 2024 pendekatan yang dipergunakan adalah Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2024 dengan nilai capaian sebesar 81,98 dari target 75 atau setara dengan 109,31 % dari target.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 triwulan II belum dapat diperbandingkan dengan dokumen Renstra terbaru.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan zona integritas adalah adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun zona integritas, penerapan budaya kerja BerAKHLAK, peningkatan integritas, peningkatan layanan, peningkatan kinerja serta penciptaan inovasi. Pemenuhan dokumen pengungkit dan reform pembangunan zona integritas sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 terus dilakukan pembaharuan oleh seluruh tim.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya oleh seluruh pegawai yang terlibat dalam mendukung indikator kinerja nilai minimal yang dipersyaratkan untuk meraih predikat WBK, salah satunya dengan penggunaan teknologi dalam pemenuhan dokumen serta untuk mengikuti pelatihan pelatihan terkait. Pada triwulan II pegawai Stasiun KIPM Aceh telah mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal KKP.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh didukung oleh anggaran yang terdapat di kelompok dukungan manajemen, namun sebagian anggaran mengalami perubahan karena efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Pada periode selanjutnya, besar harapan melalui terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terbaru, khususnya setelah terbentuknya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Secara bertahap seluruh elemen dan SDM UPT khususnya di wilayah Aceh dibawah BPPMHKP mampu menciptakan inovasi baru dan memenuhi seluruh unsur penilaian pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Dimana indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh memiliki beberapa unsur yang menjadi penilaian yaitu manajemen perubahan; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

IKS 15. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP. Berikut formula yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh :

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

IKM unit pelayanan x 25

1. [Capaian Indikator Kinerja](#)

Pada triwulan II tahun 2025 ini, SKIPM Aceh melakukan kembali pengukuran survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, yaitu pelaksanaan kegiatan pada bulan April sampai Juni tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan merekap/mendata responden SKIPM Aceh sebanyak 20 (responden) responden yang mengisi kuesioner secara online dan terintegrasi pada link www.ptsp.kkp.go.id.

Berdasarkan surat Sekretaris BPPMHKP Nomor B. 3095/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025, perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Tahun 2025 UPP BPPMHKP diperoleh nilai yang sama dengan hasil pada web PTSP KKP yaitu sebesar 88,75. Nilai capaian yang dianggap menggambarkan bahwa kinerja unit pelayanan ini dalam memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat masuk dalam kategori kinerja pelayanan kategori (A) "Sangat Baik". Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada SKIPM Aceh dipersepsikan baik oleh masyarakat pengguna jasa. Hasil pelaksanaan SKM telah dipublikasikan kepada publik melalui *social media*.

Gambar 18 Jenis Layanan BPPMHKP Aceh

**CONTACT CENTRE
BPPMHKP
ACEH**

JENIS LAYANAN

- ✓ Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal
- ✓ Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
- ✓ Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIK)
- ✓ Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)
- ✓ Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ MIPCCP
- ✓ Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)
- ✓ Pengujian Laboratorium

JAM OPERASIONAL

SENIN - KAMIS
08:00 - 16:00 WIB

JUMAT
08:00 - 16:30 WIB

INFORMASI LAINNYA

☎ 082181360808
📍 Jl. Raya Bangsara Sultan Iskandar
Muda, Blangbintang, Aceh Besar

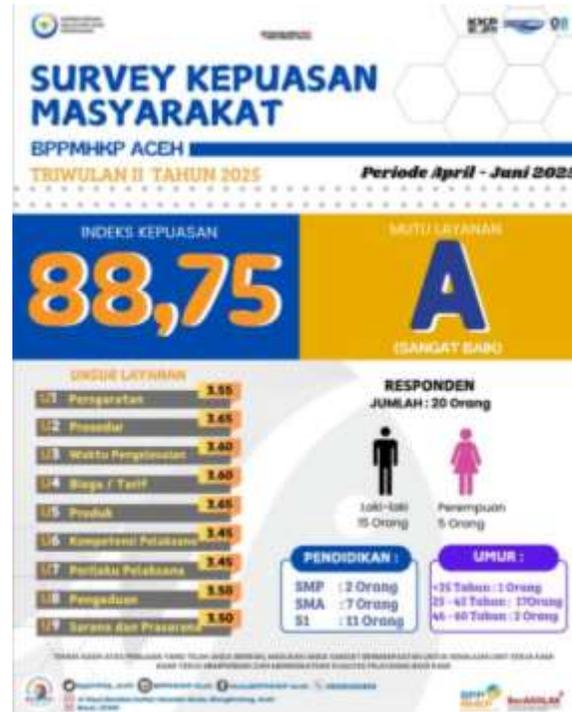
08 KKP

EKONOMI BIRU INDONESIA MAJU

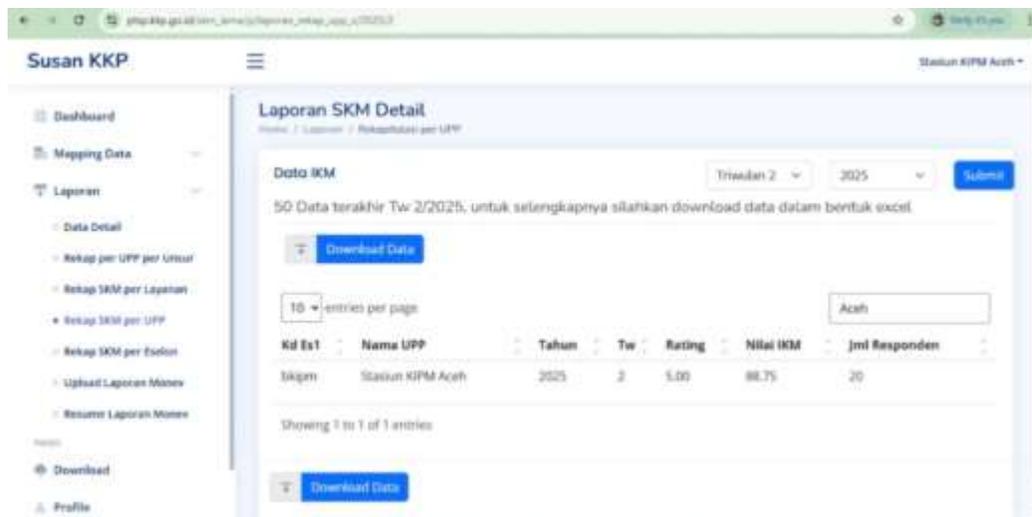
BerAKHLAK

BPPMHKP Aceh **BPPMHKP Aceh** **MutuBPPMHKP Aceh**

Gambar 19 Infografis Data Nilai Capaian Perolehan Survei Kepuasan Masyarakat SKIPM Aceh Tahun 2025 Triwulan II



Gambar 20 Capture Portal Penilaian Hasil SKM SKIPM Aceh Pada Aplikasi Susan KKP Tahun 2025



Tabel 20 Detail Nilai Unsur Pelayanan Tahun 2025 Triwulan II

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,55	3,65	3,60	3,60	3,65	3,45	3,45	3,50	3,50
Kategori	A	A	A	A	A	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	88,75 (A atau Sangat Baik)								

Tabel 21 Target dan Realisasi IKS 03.01 Tahun 2025 Triwulan II

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2025						Renstra 2025-2029	
		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	-	-	-	-	-	94,05	88	88,75	100,85	88	100,85	-	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan nilai SKM triwulan I terkait capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh sebesar 94,05. Jika dilakukan perbandingan capaian terdapat penurunan nilai dengan triwulan II tahun sebesar 88,75 dibandingkan dengan capaian indeks triwulan sebelumnya, namun harus dilakukan perhitungan intersepsi terlebih dahulu.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data pada dokumen Renstra capaian indikator Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh belum dapat dilakukan perbandingan.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh telah melebihi target yang ditetapkan. Analisa lebih lanjut telah diupayakan untuk

menghindari terjadinya kesalahan input data pada pengisian oleh responden. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat peningkatan pada nilai keseluruhan unsur pelayanan yang menjadi unsur survei kepuasan masyarakat dibandingkan capaian periode sebelumnya. *Human error* dimungkinkan dapat terjadi sebagai keputusan atau perilaku responden yang tidak tepat yang mengurangi atau berpotensi mengurangi efektivitas, keselamatan atau performa sistem yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi performa instansi. Hal ini menjadi informasi penting agar SKIPM Aceh untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanannya, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya dengan Badan Karantina Indonesia di Aceh, karena sampai dengan saat ini secara sistem dan proses masih terkait dengan kegiatan pelayanan karantina ikan. Koordinasi harus terus ditingkatkan agar pengguna jasa layanan mendapatkan pelayanan lebih baik di masa yang akan datang.

Pada triwulan II telah dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2025 terkait dengan Standar Pelayanan Publik Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Instansi Terkait, Akademisi, Masyarakat pengguna layanan, organisasi masyarakat dan media massa.

Gambar 21 Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025



Berikut beberapa isu yang terkait dengan kegiatan pelayanan :

1. Kompetensi pelayanan perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti berbagai pelatihan terkait pelayanan;
2. Masih terdapat permasalahan kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait teknis pengisian dan pemilihan jenis layanan dalam aplikasi sesuai dengan jenis layanan yang diperoleh. Serta masih ada *error* pada penginputan data SKM;
3. Perlu dilakukan sosialisasi terkait pelayanan dan sistem Siap Mutu;
4. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu : perilaku pelaksana, kompetensi pelayanan dan sarana prasarana;
5. Pelayanan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi BPPMHKP saling terkait dengan unit kerja teknis dan *stakeholder* terkait.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung capaian indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh, karena dalam implementasinya indikator ini melibatkan dukungan dari seluruh kegiatan bidang teknis pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan.

6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 didukung melalui seluruh kegiatan terkait pelayanan dan teknis kepada pengguna jasa, namun sebagian mengalami perubahan karena efisiensi anggaran.

7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 adalah dengan melakukan pengembangan pelayanan publik untuk memudahkan pengguna layanan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah ditempuh sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melakukan rapat internal petugas pelayanan, melakukan peningkatan kapabilitas kompetensi dan pengetahuan, keahlian pelaksana pelayanan dan melakukan sosialisasi kembali terkait pelayanan secara elektronik melalui media social.

3.2. Anggaran

Rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 diarahkan untuk target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran SKIPM Aceh tahun 2025 berdasarkan data RKAKL dengan pagu awal adalah sebesar Rp. 4.909.192.000 hingga pagu terbaru per akhir periode triwulan II adalah sebesar Rp. 3.889.928.000 ,-. Nilai persentase realisasi anggaran atau keuangan SKIPM Aceh pada tahun 2025 hingga akhir bulan Juni terserap sebesar 51,31 %, dengan nilai Rp. 1.995.744.435,-. Pencapaian atau realisasi ini tentunya adalah upaya maksimal yang dapat dilakukan dan merupakan hasil kerja sama seluruh komponen di SKIPM Aceh.

Selama akhir periode tahun 2025 triwulan II terdapat perubahan pagu anggaran terkait efisiensi anggaran. Terdapat revisi relaksasi blokir atau pengurangan pagu blokir untuk keperluan belanja listrik, internet, sertifikasi lembaga dan lainnya. Strategi atau rencana untuk periode selanjutnya, SKIPM Aceh akan lebih memperkuat sisi perencanaan kegiatan dan lebih cermat dalam melakukan pencairan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan ditetapkan, dan secara periodik akan dilakukan konsolidasi serta monitoring dan evaluasi. Selain itu SKIPM Aceh berupaya adaptif melakukan upaya mitigasi resiko dan realistis dalam menghadapi kebijakan-kebijakan atau penyesuaian otomatis yang masih diterapkan dalam pengelolaan anggaran pada periode selanjutnya. Dari laporan penerimaan PNBP hingga akhir periode triwulan II Tahun 2025 terdapat penerimaan Rp. 4.851.498,- dari estimasi pendapatan sebesar 32.250.000,- atau setara dengan 15,04 %.

Gambar 22 Data E Monev Bappenas Tahun 2025 Sampai Triwulan II



Sumber : <https://e-monev.bappenas.go.id/2025>

3.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Stasiun KIPM Aceh berdasarkan data sistem informasi kepegawaian hingga bulan Juni tahun 2025 sebanyak 16 orang PNS dan Non PNS sebanyak 12 orang. Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja terbaru, dimana dengan terbentuknya BPPMHKP. Berikut data jumlah pegawai di SKIPM Aceh.

Tabel 22 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Struktural (Kepala SKIPM Aceh)	1 Orang
2	Ketua Tim Kerja	1 Orang
	a. Dukungan Manajemen / Analis Pengelolaan Keuangan APBN	1 Orang
	b. Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	1 Orang
	c. Pengawasan, Pengendalian dan Informasi / Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	1 Orang
	d. Penerapan Standard dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	1 Orang
3	Fungsional Tertentu :	
	a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	1 Orang
	b. Asisten Inspektur Mutu	3 Orang
	c. Pranata Komputer	1 Orang
4	Fungsional Umum	
	a. Analis Mutu Hasil Perikanan	4 Orang
	b. Bendahara Pengeluaran	1 Orang
	c. Pengadministrasi Bahan Pengawasan dan Pengendalian	1 Orang
5	Tenaga Non PNS	12 Orang
Total		28 Orang

Tabel 23 Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Magister (S2)	5 Orang
2	Sarjana / Diploma IV (S1/DIV)	7 Orang
3	Diploma 3 (D3)	3 Orang
4	SLTA / Sederajat	1 Orang

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pengukuran kinerja di SKIPM Aceh dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 15 (lima belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan data pada aplikasi kinerja SKIPM Aceh. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Juni Tahun 2025 adalah sebesar 112,26 (kategori : istimewa), dengan sebanyak 6 (enam) indikator kinerja tercapai melebihi target (persentase $\geq 110\%$) dan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan target (persentase $\geq 100\%$). Telah dilakukan upaya dan strategi agar capaian atau realisasi indikator kinerja SKIPM Aceh dapat terus meningkat di masa yang akan datang dan memenuhi ketentuan SMART.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan indikator kinerja SKIPM Aceh yang disepakati pada perjanjian kinerja tahun 2025 triwulan II telah tercapai sesuai rencana. Tantangan yang dihadapi SKIPM Aceh ke depan semakin luas sebagai akibat dari meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pengendalian mutu dan pengawasan hasil perikanan; serta belum optimalnya daya saing produk perikanan Indonesia. Selain itu, salah satu tantangan yang perlu dipersiapkan kedepan adalah adanya perubahan atau penyesuaian struktur organisasi dan tata laksana kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi dimana BPPMHKP menjadi Otoritas Kompeten terhadap pemenuhan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Kondisi di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tugas dan fungsi SKIPM Aceh ditandai dengan semakin besarnya beban kerja dan kompleksitas tugas; semakin meningkatnya kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM aparatur; perlunya pementapan regulasi dan sistem pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif dan harmonis; perlunya kesiapan sarana prasarana guna pemenuhan standar dan persyaratan pengawasan/pemeriksaan/pengujian dalam rangka peningkatan daya saing, nilai tambah dan kepercayaan stakeholder.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja SKIPM Aceh dan sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut

- Meningkatkan kualitas komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder baik internal Stasiun KIPM Aceh dan BPPMHKP Pusat maupun eksternal (Pengguna Jasa, Pemerintah Daerah, Bea Cukai, BKHIT, dll) guna memperoleh hasil maksimal dalam pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan pembangunan zona integritas dan pemenuhan dokumen di Stasiun KIPM Aceh agar lebih optimal.

Demikian laporan kinerja SKIPM Aceh tahun 2025 triwulan II ini dibuat, semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pengelolaan dan pelaporan kinerja SKIPM Aceh pada masa yang akan datang.